

## Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Kelompok Usaha Perempuan Mandiri (KURMA) di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo

Achmad Marcelianto Sumarsono<sup>1)</sup>, Eny Haryati<sup>2)</sup>, Kristyan Dwijosusilo<sup>3)</sup>

<sup>1) 2) 3)</sup> Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: marcellsumarsono@gmail.com

### ABSTRAK

Program pemberdayaan perempuan merupakan upaya strategis untuk meningkatkan peran serta dan kesejahteraan ekonomi perempuan dalam masyarakat. Salah satu program yang diimplementasikan adalah Kelompok Usaha Perempuan mandiri (KURMA), yang bertujuan untuk memberikan dukungan finansial dan pelatihan kepada perempuan untuk memajukan usaha mikro mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi program KURMA serta efektivitas program tersebut. Fokus penelitian adalah pada kelebihan dan kekurangan program serta penerapan konsep pemberdayaan perempuan berdasarkan teori Effendy (2022), seperti *enabling*, *empowering*, dan *protecting*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melibatkan wawancara dan observasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program KURMA telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi perempuan dengan memberikan akses finansial dan pelatihan yang relevan. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti beberapa kekurangan teridentifikasi, termasuk kurangnya evaluasi lanjutan dan tantangan persaingan pasar yang ketat. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan dan perbaikan program, serta kontribusi pada pemahaman tentang pemberdayaan perempuan melalui program-program seperti KURMA. Dengan demikian, rekomendasi diberikan untuk meningkatkan promosi dan sosialisasi Program KURMA, serta memperluas cakupan dan aksesibilitas program bagi perempuan di Kecamatan Krian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman lebih lanjut tentang upaya pemberdayaan perempuan melalui program-program seperti KURMA dalam konteks lokal.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan Masyarakat, Program KURMA, Peningkatan Kesejahteraan

### Abstract

*Women's empowerment programs are strategic efforts to improve the participation and economic welfare of women in society. One of the programs implemented is Kelompok Usaha Perempuan mandiri (KURMA), which aims to provide financial support and training to women to advance their micro businesses. This study aims to analyze the implementation of the KURMA program and its effectiveness. The focus of the research is on the strengths and weaknesses of the program and the application of the concept of women's empowerment based on Effendy's theory (2022), such as enabling, empowering, and protecting. The research method used was qualitative with a descriptive approach, involving interviews and observation as data collection techniques. The results show that the KURMA Program has had a positive impact in improving women's economic welfare by providing financial access and relevant training. However, there are still some challenges that need to be addressed, as several shortcomings were identified, including the lack of follow-up evaluations and the challenge of intense market competition. This research provides valuable insights for program development and improvement, as well as contributing to the understanding of women's empowerment through programs such as KURMA. As such, recommendations are provided to improve the promotion and socialization of the KURMA program, as well as expanding the scope and accessibility of the program for women in Krian sub-district. This research is expected to contribute to further understanding of women's empowerment efforts through programs such as KURMA in a local context.*

**Keywords:** Community Empowerment, KURMA Program, Welfare Improvement

## A. LATAR BELAKANG

Pemberdayaan perempuan sebuah isu yang saat ini menjadi perhatian global serta memegang peranan dalam pembangunan sosial dan ekonomi berkelanjutan. Beberapa negara termasuk Indonesia, upaya peningkatan pemberdayaan perempuan telah menjadi bagian integral dari agenda pembangunan terutama dalam konteks Administrasi Publik. Program yang dimiliki Indonesia yang bertujuan meningkatkan akses perempuan ke sumber daya, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi politik menjadi suatu hal yang penting bagi kemajuan bangsa. Pemberdayaan adalah upaya untuk memberdayakan masyarakat, terutama perempuan, agar mereka dapat meningkatkan keterampilan mereka sendiri demi mencapai kualitas hidup yang lebih baik.

Menurut data statistik 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistika (BPS) jumlah penduduk perempuan di Indonesia sekitar 170 juta sementara jumlah penduduk laki-laki sekitar 167 juta. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia yaitu perempuan. Melihat bahwa perbandingan populasi perempuan lebih besar dari laki-laki maka memberikan landasan kuat untuk mendukung serta mendorong pemberdayaan dalam masyarakat.

Melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, upaya dilakukan untuk mengurangi kesenjangan gender yang tinggi pada perempuan. pemerintah mengeluarkan strategi *Three Ends* yang memuat tiga prinsip yaitu:

1. *End violence against women and children* (mengakhiri kekerasan terhadap anak dan perempuan).
2. *End human trafficking* (mengakhiri perdagangan manusia).
3. *End barrier to economic justice* (mengakhiri kesenjangan terhadap perempuan) (Haryani & Zadyanti, 2021).

Menurut Hulme dan Turner, pemberdayaan masyarakat mendorong perubahan sosial yang membuat kelompok yang sebelumnya kurang berpengaruh dapat memiliki peran yang lebih signifikan dalam kehidupan

politik, baik di tingkat lokal maupun nasional. (Humaira, 2022). Menurut data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2021, lebih dari setengah, atau sekitar 54 persen, dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia dimiliki oleh perempuan. Selain itu, sekitar 97 persen dari total pegawai di sektor tersebut didominasi oleh perempuan. Fakta ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang sangat signifikan dalam pengembangan ekonomi Indonesia dan harus diperhatikan dengan serius (<https://www.kemenkeu.go.id>, diakses pada 23 Oktober 2023). Perempuan penyumbang peran terbesar dalam membantu mengembangkan perekonomian negara. Untuk mengoptimalkan peran perempuan dibutuhkan serta upaya kolektif dari pemerintah, masyarakat dan sektor swasta sehingga dapat mewujudkan upaya pemberdayaan yang optimal. Melalui kolaborasi ketiga aktor pelaku kebijakan dalam upaya pemberdayaan masyarakat maka akan mewujudkan visi sebuah masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia.

Upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui kebijakan ekonomi daerah sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi daerah yang berbunyi "*Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan tanggung jawab daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat lokal di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*". Pemberdayaan masyarakat merupakan aspek penting dan saling terkait dengan konsep otonomi daerah. Saling keterkaitan 2 aspek ini yaitu bukan hanya memberikan wewenang kepada pemerintah lokal akan tetapi tentang memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan langsung dalam proses pembangunan daerah. Otonomi daerah telah memberikan kewenangan kepada pemerintah lokal untuk merancang hingga melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warganya. Dengan adanya otonomi daerah pemerintah lokal memiliki kesempatan untuk dapat mengidentifikasi isu yang sedang berkembang, mengalokasikan sumber daya dengan bijak serta

merespon perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tanggap sehingga pemerintah daerah dapat memberikan solusi yang lebih efektif dalam menjawab isu daerah.

Salah satu program yang memegang peran penting adalah Program KURMA atau bisa disebut Program Kelompok Usaha Perempuan mandiri. Program KURMA adalah inisiatif pemerintah Indonesia yang dirancang khusus untuk membantu dan mendorong perempuan Indonesia dalam berwirausaha dan mandiri secara ekonomi. Program KURMA bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi perempuan, memberikan akses keuangan, serta memberdayakan mereka untuk menjadi pelaku usaha yang sukses. Program KURMA bertujuan untuk mengurangi ketimpangan gender dalam akses ke sumber daya ekonomi dan memajukan perempuan dalam dunia usaha. Melalui bantuan keuangan dan pelatihan yang disediakan, program ini memberikan peluang kepada perempuan untuk mengembangkan potensi mereka sebagai pengusaha yang mandiri dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara.

Usaha perempuan mandiri adalah aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh perempuan dengan tujuan untuk mendapatkan pendapatan atau meningkatkan pendapatan keluarga. Usaha ini bisa dilakukan oleh perempuan secara individu atau dalam kelompok di dalam komunitas lokal, atau melalui keterlibatan dalam organisasi sosial, agama, atau koperasi (Haryati et al., 2022). Untuk mendukung dan memperkuat usaha-usaha tersebut, pemerintah telah memulai program KURMA. Program ini difokuskan pada usaha mikro yang beroperasi di tingkat masyarakat. Tujuannya adalah memberikan dukungan finansial dan pelatihan kepada perempuan yang berusaha, dengan harapan bahwa mereka akan menjadi agen perubahan dalam ekonomi mereka sendiri dan memberikan manfaat bagi keluarga dan masyarakat setempat. Melalui program KURMA, pemerintah berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan usaha perempuan mandiri, yang diharapkan akan

berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Di Kecamatan Krian, seperti halnya wilayah lain di Indonesia, upaya-upaya pemberdayaan perempuan menjadi prioritas. Salah satu tindakan yang dilakukan adalah dengan melaksanakan program KURMA (Kelompok Usaha Perempuan Mandiri). Program ini hadir sebagai inisiatif penting untuk meningkatkan peran ekonomi perempuan. Dengan memberikan peluang bagi perempuan untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi, meningkatkan keterampilan mereka, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan mereka dan komunitas secara keseluruhan. Pemerintah daerah dan masyarakat di Krian telah berkolaborasi untuk memastikan kesuksesan program ini. Mereka telah mendirikan pusat pelatihan dan dukungan untuk perempuan yang ikut serta. Selain itu, kerja sama dengan lembaga keuangan lokal telah memastikan akses perempuan terhadap sumber daya finansial yang mereka butuhkan. Program KURMA di Krian tidak sekadar memberikan bantuan finansial, tetapi juga bertujuan untuk memberdayakan perempuan, memberikan mereka kemandirian ekonomi, serta membangun masa depan yang lebih baik. Dengan demikian, program KURMA menjadi langkah penting dalam mencapai pemberdayaan perempuan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah tersebut.

Program Kelompok Usaha Perempuan mandiri (KURMA) adalah langkah yang signifikan yang mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Program ini, yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia, bertujuan untuk memperluas kesempatan bagi perempuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, pelatihan, dan kesempatan usaha. KURMA secara langsung berdampak pada beberapa target SDGs, terutama pada SDG nomor 5 yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Program ini berperan dalam mencapai kesetaraan gender dengan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi perempuan

untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan, pekerjaan, dan dukungan dalam kewirausahaan. Selain itu, program ini juga mendukung tujuan SDG nomor 1, yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk. Pada SDG nomor 8, fokusnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang memperhatikan semua orang dan berkelanjutan, serta berhubungan dengan pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan memberikan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi dan pelatihan, program Kurma memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan, mendorong inklusi ekonomi, dan mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, Program Kurma merupakan contoh konkret dari upaya Indonesia untuk mencapai tujuan-tujuan SDGs dan memastikan bahwa tidak ada yang ditinggalkan dalam perjalanan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan (UCLG, n.d.).

## **B. LANDASAN TEORITIS**

### **1. Teori Pelayanan Publik**

Pemberdayaan masyarakat adalah proses di mana orang-orang atau kelompok-kelompok dalam suatu komunitas diberi pengetahuan, keterampilan, sumber daya, dan kepercayaan diri yang diperlukan untuk terlibat secara aktif dalam mengambil keputusan yang dirasa mempengaruhi kehidupan mereka sendiri dan lingkungan sekitar. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya berarti memberikan bantuan atau sumber daya kepada mereka. Ini lebih tentang memberikan kekuasaan kepada komunitas untuk mengendalikan arah masa depan mereka sendiri. Ini berarti memberikan alat dan pengetahuan kepada mereka agar bisa mengatasi rintangan yang dihadapi, serta mendorong partisipasi aktif dalam proses tersebut (Herana; Fatmawati; Asdar, 2023). Ini adalah konsep yang mendasari partisipasi, kemandirian, dan tanggung jawab dalam pembangunan dan pengelolaan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pada saat ini, istilah “pemberdayaan masyarakat” yang berasal dari kata “*empowerment*”, semakin

umum digunakan dalam percakapan sehari-hari di Indonesia, bersamaan dengan istilah “pengentasan kemiskinan” (Ghani, M. Al., Parlindungan, D.m & Delansyah, 2020).

Menurut Prijono, S. Onny dan Pranarka, A.M.W (1996), pemberdayaan adalah proses untuk memberi kekuatan kepada individu atau masyarakat agar mereka menjadi lebih mampu. Ini berarti menginspirasi atau mendorong mereka untuk memiliki kemampuan atau kekuatan dalam mengambil keputusan tentang hidup mereka sendiri (Safiuddin et al., 2017). Pemberdayaan sebagai bagian dari usaha mengatasi kemiskinan telah diatur Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2010 mengenai Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

### **2. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat**

Prinsip pemberdayaan masyarakat adalah landasan utama yang menjadi pijakan dalam upaya untuk menguatkan dan memberdayakan komunitas. Dalam melaksanakan pemberdayaan, prinsip-prinsip ini menjadi pedoman yang mengarahkan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan efektif dan berkelanjutan. Dengan memahami dan mengadopsi prinsip-prinsip ini, kita dapat memastikan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya memberikan bantuan sementara, tetapi juga menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan memberikan kontrol kepada masyarakat atas nasib mereka sendiri.

Pemberdayaan masyarakat memiliki beberapa prinsip, diantaranya:

#### **a) Prinsip Kesetaraan**

Prinsip utama dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah menciptakan kesetaraan antara masyarakat dan lembaga yang menyelenggarakan program-program pemberdayaan, tanpa memandang jenis kelamin. Ini melibatkan membangun hubungan yang didasarkan pada kesetaraan, di mana berbagai

pengetahuan, pengalaman, dan keahlian saling diakui dan dipertimbangkan. Setiap pihak menghargai kelebihan dan kelemahan satu sama lain, sehingga terjadi pertukaran pengetahuan dan pengalaman yang saling memperkaya.

b) Partisipasi

Program pemberdayaan yang efektif dalam merangsang kemandirian masyarakat adalah program yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Namun, mencapai tingkat tersebut membutuhkan waktu dan pendampingan yang cermat, dengan pendamping yang memiliki komitmen tinggi terhadap proses pemberdayaan masyarakat.

c) Keswadayaan atau Kemandirian

Prinsip keswadayaan mengutamakan kemampuan masyarakat daripada bergantung pada bantuan dari pihak lain. Konsep ini tidak melihat orang miskin sebagai objek yang tidak memiliki kemampuan, tetapi sebagai subjek yang memiliki potensi yang terbatas. Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang luas tentang tantangan yang mereka hadapi, pemahaman tentang lingkungan mereka, tenaga kerja, dan semangat untuk berkembang, serta norma-norma sosial yang mereka taati. Semua ini merupakan sumber daya yang harus ditemukan dan dimanfaatkan sebagai dasar untuk proses pemberdayaan.

d) Keberlanjutan

Program pemberdayaan harus dirancang agar dapat berlanjut, meskipun pada awalnya pendamping memegang peran yang lebih dominan daripada masyarakat itu sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, peran pendamping akan semakin berkurang secara bertahap, bahkan pada akhirnya bisa dihilangkan sama sekali, karena masyarakat telah mampu mengelola kegiatan mereka sendiri. (Suaib, 2023).

### 3. Pendekatan Pemberdayaan

Memberdayakan masyarakat berarti memberikan kemampuan dan kemandirian kepada mereka. Dalam konteks ini, menurut Suprayogi (2011: 181), usaha untuk memberdayakan masyarakat dapat dilakukan melalui tiga jalur yang berbeda, diantaranya:

a) *Enabling*

Yaitu menciptakan suasana yang mendukung agar potensi masyarakat dapat tumbuh dan berkembang. Ide dasarnya adalah mengakui bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki bakat yang bisa dikembangkan. Pemberdayaan adalah usaha untuk memperkuat potensi tersebut dengan cara memberikan dorongan, motivasi, dan meningkatkan kesadaran akan potensi yang dimiliki, serta berusaha untuk mengembangkannya.

b) *Empowering*

Adalah tentang meningkatkan kemampuan dengan memperkuat potensi atau kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat. Ini melibatkan tindakan nyata seperti memberikan berbagai jenis dukungan dan memberikan akses kepada peluang-peluang yang dapat membuat masyarakat menjadi lebih mandiri dan berdaya.

c) *Protecting*

Yaitu tentang menjaga kepentingan dengan membangun sistem perlindungan bagi masyarakat yang sedang mengalami proses pembangunan. Proses pemberdayaan harus menghindari agar yang sudah lemah tidak semakin terpinggirkan, karena ketidakberdayaan mereka dalam menghadapi yang lebih kuat. Melindungi dalam konteks ini adalah usaha untuk mencegah terjadinya ketidakseimbangan persaingan dan eksploitasi yang dilakukan oleh pihak yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah (Suaib, 2023).

#### 4. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan masyarakat adalah keadaan yang mencakup berbagai aspek, seperti kesehatan, kondisi ekonomi, tingkat kebahagiaan, dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Menurut Midgley (dalam Soetomo, 2006:12), kesejahteraan sosial terdiri dari tiga elemen utama: sejauh mana masalah sosial dapat dikendalikan, seberapa besar kebutuhan dapat dipenuhi, dan sejauh mana individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat memiliki kesempatan. Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, kesejahteraan sosial mencakup pemenuhan kebutuhan dasar manusia baik secara materi, spiritual, maupun sosial, sehingga mereka dapat hidup dengan layak dan berkembang secara pribadi untuk menjalankan peran sosial mereka. (Sumber : Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009).

Menurut Bentham (1748-1832), Grand Theory Kesejahteraan *Welfare State* menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan kebahagiaan atau kesejahteraan terbesar bagi sebanyak mungkin warganya. Ini berarti bahwa pemerintah dianggap bertanggung jawab untuk memenuhi kepentingan rakyatnya. Konsep ini juga terkait dengan ide utilitarianisme, yang mengukur kebijakan dan tindakan pemerintah berdasarkan seberapa banyak mereka meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan (Hantoro, 2019).

#### 5. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan masyarakat berkelanjutan adalah metode untuk mengembangkan yang memperhatikan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pelestarian lingkungan alam dalam jangka waktu yang berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk membentuk masyarakat yang makmur dan sehat, yang beriringan dengan keberlanjutan alam dan budaya, serta memastikan bahwa sumber daya alam dan sosial dapat dinikmati oleh generasi saat ini dan masa depan.

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang memperhatikan kebutuhan saat ini tanpa merugikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Istilah ini dijelaskan dalam Pertemuan Tingkat Tinggi PBB tahun 2005, yang menyoroti tiga aspek kunci dari pembangunan berkelanjutan: ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang saling memberi dukungan dan memperkuat satu sama lain.

### C. METODE

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan upaya manusia untuk menjawab pertanyaan atau memperoleh pemahaman tentang fenomena yang menarik minat. Dalam penelitian ini, penulis memilih metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jane Richie, sebagaimana dikutip oleh Moleong (2014), menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan usaha Untuk memahami dunia sosial dari perspektif subjek penelitian terhadap konsep, perilaku, persepsi, dan isu yang relevan juga menekankan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah Untuk mencapai pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan lainnya, dengan menggambarkannya secara komprehensif dalam konteks tertentu. Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan metode yang alami atau natural (Alaslan, et al., 2023).

Penelitian ini memilih metode kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang upaya pemberdayaan masyarakat melalui program KURMA di Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang objek penelitian. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami peristiwa atau perilaku manusia dalam konteks organisasi. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan

masalah dengan sistematis dan akurat, dengan mengandalkan temuan fakta-fakta lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran detail tentang objek penelitian. Metode kualitatif dipilih karena dianggap sesuai dengan tujuan penelitian. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara untuk memastikan akurasi dan keberhasilan dalam memperoleh informasi yang diperlukan.

## 2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah suatu batasan yang mengidentifikasi masalah yang akan diselidiki, sehingga menetapkan batasan yang jelas terkait dengan objek penelitian. Fokus penelitian ini mencakup kerangka berpikir yang telah dirumuskan. Meskipun fokus penelitian dapat berubah atau berkembang seiring dengan temuan di lapangan, tetapi penelitian tetap berusaha mempertahankan fokusnya dan desain penelitiannya sesuai dengan rumusan awal. Dalam hal ini, fokus penelitian adalah pemberdayaan masyarakat melalui program KURMA di Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Fokus penelitian akan dianalisis dengan menggunakan teori Suprayogi tentang tiga konsep pemberdayaan, yaitu *enabling*, *empowering*, dan *protecting*.

## 3. Lokasi Penelitian

Menurut Moleong (2018: h. 127), proses pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada teori secara empiris, yang kemudian dijabarkan menjadi data-data yang bersifat sementara. Memilih lokasi penelitian merupakan langkah penting dalam penelitian kualitatif karena menentukan objek dan tujuan penelitian.

Alasan pemilihan Kecamatan Krian sangatlah berbobot. Pertama, Kecamatan Krian mencerminkan kondisi pedesaan di Indonesia di mana perempuan sering menghadapi kesulitan dalam mengakses peluang ekonomi dan peran sosial. Melalui penelitian di sini, dampak program Kurma dalam mengatasi tantangan-tantangan ini

dapat dieksplorasi secara mendalam dalam konteks pedesaan yang khas. Kedua, Kecamatan Krian memiliki kelompok usaha perempuan yang aktif dalam Program Kurma, membuatnya menjadi subjek ideal untuk memahami efek program ini terhadap pemberdayaan perempuan. Dengan terlibat langsung dengan kelompok-kelompok ini, penelitian dapat menyelidiki secara mendalam dinamika pemberdayaan perempuan, termasuk peningkatan ekonomi, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan perkembangan bisnis mereka.

## D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

### 1. Pemberdayaan Melalui Program KURMA di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo

Kebijakan program KURMA yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah berjalan selama dua tahun sejak dimulainya pada tahun 2022. Program ini adalah satu dari 17 program prioritas yang diprioritaskan oleh bupati dan wakil bupati Sidoarjo. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi perempuan di Kabupaten Sidoarjo, dengan memberikan berbagai dukungan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi perempuan dalam bidang ekonomi. Sebagai bagian dari mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, Kecamatan Krian dengan beragam potensi ekonomi yang dimiliki warganya telah turut berpartisipasi dalam mengimplementasikan program KURMA.

Program KURMA telah berjalan sejak tahun 2022 yaitu tahap pertama dan 2023 sebagai tahap kedua. Melalui data yang dimiliki oleh kecamatan Krian pada tahun 2022 terdapat 140 UMKM yang berhasil terdaftar sebagai penerima program KURMA dan pada tahun 2023 terdapat 112 UMKM yang terdaftar sebagai penerima program KURMA. Sektor Usaha Mikro (UM) adalah komponen vital dalam mendukung ekonomi baik di tingkat daerah maupun nasional, termasuk di Indonesia. Hampir semua dari

total 64,2 juta unit usaha di Indonesia, atau lebih tepatnya sekitar 99,9%, beroperasi dalam kategori Mikro, Kecil, dan Menengah (MKM). Angka yang tinggi ini menunjukkan betapa signifikannya kontribusi Usaha Mikro dalam memperkuat perekonomian masyarakat.

Di Kecamatan Krian, terdapat total 252 penerima program KURMA. Program ini memberikan bantuan kepada para penerima untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Dengan adanya 252 penerima, dapat diantisipasi bahwa program ini memiliki dampak yang signifikan dalam mendukung upaya pemberdayaan ekonomi di wilayah tersebut. Menurut penuturan Pak Mahfud, yang merupakan salah satu pengelola pemberdayaan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, program KURMA tidak hanya memberikan bantuan finansial kepada para penerima, tetapi juga disertai dengan pendampingan dan pelatihan. Pelatihan ini dianggap sebagai bekal bagi pelaku usaha KURMA agar usaha mereka dapat berkembang secara berkelanjutan. Pelatihan ini diberikan secara awal kepada para penerima KURMA sebagai bagian dari program pemberdayaan, dengan fokus utama pada peningkatan manajemen usaha.

Menurut Suprayogi (2011: 181), usaha untuk memberdayakan masyarakat dapat dilakukan melalui tiga jalur yang berbeda yakni *enabling*, *empowering*, dan *protecting*. Melalui data yang telah terkumpul, penulis bermaksud untuk menganalisis pemberdayaan perempuan melalui program KURMA di Kecamatan Krian dengan menggunakan konsep pemberdayaan yang dikemukakan oleh Suprayogi yaitu *enabling*, *empowering*, dan *protecting*. Konsep ini menjadi landasan penting dalam memahami bagaimana bentuk dari pemberdayaan melalui program KURMA.

#### a) *Enabling*

Konsep *enabling* memiliki peran yang sangat penting dalam konteks pemberdayaan masyarakat melalui

program KURMA di Kecamatan Krian. Melalui upaya *enabling*, program KURMA bertujuan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan potensi masyarakat, khususnya perempuan dalam bidang bisnis. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberikan akses kepada sumber daya, informasi, dan pelatihan yang diperlukan, program ini memungkinkan perempuan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam berwirausaha.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menjalankan program pemberdayaan masyarakat yaitu program KURMA, sebagai langkah konkret untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya perempuan, melalui usaha mandiri. Kesuksesan implementasi program ini dapat dilihat dari respons positif yang diterima dari masyarakat yang terlihat dari tingginya antusiasme dan kesadaran mereka dalam mengembangkan usaha mereka sendiri guna meningkatkan pendapatan.

#### b) *Empowering*

Konsep *empowering* merujuk pada proses pemberdayaan individu atau kelompok untuk mengambil kontrol atas kehidupan mereka sendiri, meningkatkan kemandirian, dan mengambil peran aktif dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Pemberdayaan ini melibatkan pemberian akses terhadap sumber daya, peningkatan keterampilan dan pengetahuan, serta pembangunan kepercayaan diri dan motivasi yang diperlukan untuk menghadapi hambatan dan mencapai target yang diharapkan. Hal ini juga mencakup terkait bagaimana bentuk program yang telah disediakan. Menurut Pak Mahfud Dinas Koperasi Usaha Mikro dalam wawancara 15 Februari 2024, Terdapat pendampingan manajemen usaha sebagai upaya memotivasi

masyarakat agar terus mengembangkan usahanya.

c) *Protecting*

Proteksi pemberdayaan dalam konteks Program KURMA di Krian menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan keberlanjutan dan kesuksesan usaha mikro di wilayah tersebut. Dalam melaksanakan program ini, perlindungan pemberdayaan dilakukan melalui beberapa aspek kunci. Pertama, adanya bimbingan dan pendampingan yang berkelanjutan bagi para penerima manfaat KURMA. Dengan adanya pendampingan ini, para pelaku usaha mikro dapat terus mendapatkan arahan, saran, dan dukungan dalam menghadapi tantangan operasional sehari-hari serta mengoptimalkan potensi usaha mereka.

Secara keseluruhan, proteksi pemberdayaan dalam program KURMA di Krian mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa manfaat yang diberikan tidak hanya bersifat sebatas waktu, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang. Dengan demikian, program ini tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh untuk pengembangan ekonomi mikro di Krian. Selain itu, peran pemerintah juga penting dalam memastikan adanya regulasi yang mendukung dan melindungi keberlangsungan program serta memberikan solusi atas berbagai tantangan yang muncul selama proses implementasi. Dengan demikian, kolaborasi erat antara masyarakat yang berpartisipasi aktif dan pemerintah yang bertindak sebagai fasilitator dan pelaksana implementasi kebijakan menjadi kunci kesuksesan dalam mewujudkan tujuan dan dampak positif dari program KURMA.

## 2. Respon Masyarakat Terhadap Program KURMA

Program KURMA telah berjalan sejak tahun 2022 hingga saat ini. Kehadiran program KURMA disambut baik oleh masyarakat khususnya kecamatan Krian sebagai salah satu daerah penerima manfaat KURMA ini. Hal ini sesuai dengan pernyataan menurut Bu Wiwik selaku Kasi Perekonomian yang menangani program ini di wilayah kecamatan Krian mengatakan bahwa:

*“Masyarakat sangat antusias untuk berpartisipasi dalam program kurma meskipun pada awalnya masyarakat kurang tertarik berpartisipasi dalam program ini. Juga karena pihak dari kecamatan lebih massif untuk melakukan sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat lebih banyak lagi serta menjadi bagian dari strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh Kecamatan Krian”* (Wawancara 18 Januari 2024).

Program KURMA memberikan bantuan modal usaha sebesar Rp 6.000.000 kepada masyarakat, terutama yang memiliki usaha. Dengan bantuan ini, masyarakat merasa bahwa program KURMA telah memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan mereka. Secara ekonomi, program ini memberikan peluang untuk meningkatkan penghasilan, kemandirian finansial, dan menciptakan lapangan kerja, terutama bagi masyarakat yang belum bekerja. Di Kecamatan Krian, yang merupakan wilayah padat penduduk, sebanyak 113 unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah menerima manfaat dari program KURMA pada tahun 2022. Implementasi program KURMA telah memberikan dampak yang nyata di tengah pasang surut perekonomian masyarakat.

Menurut pendapat Ibu Dwi Murni, salah satu penerima manfaat program

KURMA dan juga selaku Ketua Anggota Kelompok Usaha Karya mandiri yaitu:

*“Program Kurma ini kalau dikatakan berdampak sangat berdampak banget mas terutama bagi pelaku usaha seperti kami. Jadi untung-untung buat tambahan modal buka usaha yang lebih besar lagi”* (Wawancara 31 Januari 2024).

Berdasarkan keterangan wawancara yang diperoleh peneliti, program KURMA yang telah diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah memberikan dampak positif yang nyata terhadap perekonomian masyarakat, terutama di Kecamatan Krian yang dikenal memiliki sejumlah UMKM yang cukup signifikan. Dalam wawancara tersebut, disampaikan bahwa program ini telah berhasil meningkatkan akses masyarakat terhadap modal usaha melalui pembiayaan yang mudah dan terjangkau. Para pelaku usaha mikro dan kecil dan kecil di Kecamatan Krian melaporkan peningkatan dalam produksi, pendapatan dan ekspansi usaha setelah mendapat dukungan dari program KURMA. Menurut pernyataan yang disampaikan Ibu Ruth Yuniati selaku ketua kelompok usaha Maju Jaya yang mengatakan:

*“Sebelum menjadi peserta program KURMA ini saya hanya membuka usaha kecil kecilan dirumah mas, sehingga banyak orang yang tidak tahu dan jualan saya termasuk sepi banget. Alhamdulillah setelah mendapat bantuan dari program KURMA ini membantu sekali dalam perekonomian. Saya bisa buka stand yang lebih besar di pinggir jalan seperti ini dan usaha saya sedikit demi sedikit berkembang”.*

## E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 1. Kesimpulan

Program KURMA telah berjalan sejak tahun 2022 hingga saat ini. Aktor yang berperan dalam kebijakan program KURMA

adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecamatan, Operator Desa dan masyarakat pelaku usaha. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap perempuan guna melakukan upaya peningkatan pendapatan serta ekonomi masyarakat Krian.

#### a) Implementasi Program KURMA di Kecamatan Krian

Dari hasil implementasi program KURMA, dapat disimpulkan bahwa program ini telah sukses diterima dan diapresiasi dengan baik oleh masyarakat. Alur pendaftaran yang dianggap mudah bagi masyarakat menjadi salah satu faktor pendukung dalam kesuksesan program ini. Selain itu, peran aktif pemerintah dalam mendukung serta memfasilitasi implementasi program, serta partisipasi masyarakat yang antusias, juga menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan KURMA. Kesimpulan ini mengindikasikan bahwa program KURMA telah berhasil menjadi instrumen efektif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memberikan akses, dukungan, dan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan usaha mandiri.

#### b) Bentuk pemberdayaan Program KURMA di Kecamatan Krian

Dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan melalui program KURMA, khususnya dalam bentuk pelatihan manajemen usaha, memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan usaha mikro di berbagai wilayah, termasuk di Krian. Melalui pelatihan manajemen usaha, para pelaku usaha mikro mendapatkan bekal pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola usaha mereka dengan lebih efisien dan efektif. Mereka menjadi lebih siap dalam menghadapi tantangan operasional

sehari-hari dan mampu mengoptimalkan potensi usaha mereka.

## 2. Rekomendasi

Meskipun program telah berjalan dengan baik tapi tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada beberapa poin yang masih terselip di dalamnya. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan saran terhadap pelaksanaan program KURMA untuk pelaksanaan program KURMA agar lebih baik ke depannya:

- a) Bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
  - 1) Penguatan pelatihan
  - 2) Diversifikasi program. Selain pelatihan, program KURMA dapat diperluas dengan menyediakan berbagai jenis bantuan lainnya, seperti bantuan teknis, akses pasar, dan bantuan modal akan memungkinkan peserta untuk memilih program yang paling sesuai dengan kebutuhan dan potensi usaha mereka.
  - 3) Penguatan jaringan kerjasama
  - 4) Evaluasi dan pemantauan yang berkelanjutan
  - 5) Penguatan komunikasi dan promosi
- b) Bagi Masyarakat
  - 1) Masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh program KURMA dengan aktif terlibat dalam kegiatan pelatihan, seminar, dan lokakarya yang diselenggarakan.
  - 2) Manfaatkan dukungan yang disediakan oleh program KURMA, termasuk akses modal, pelatihan kewirausahaan, dan bimbingan teknis.

(UMKM). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 22–30.

- Ghani, M. Al., Parlindungan, D., & Delansyah, M. I. (2020). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Peningkatan Nilai Guna Sampah Anorganik di Wilayah Legoso Raya Pisangan Ciputat Timur. *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, 1–7.
- Hardiansyah, R., Nurwati, R. N., & Taftazani, B. M. (2023). Keberhasilan Program Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (Prse) Desa Tarunajaya. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 6(1), 125–134.
- Haryani, T. N., & Zadyanti, R. (2021). Analisis Gender Model Longwe Pada Program Industri Rumahan di Kota Pangkalpinang. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 6(2), 65–78.
- Humaira, D. R. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, 7(2), 99–108.
- Kaharuddin. (2021). Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi. *Jurnal Pendidikan*, 9(1), 1–8.
- Kemsetneg RI. (2021). Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. *Perpres. Peraturan Presiden Republik Indonesia. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 1–13.
- Manurung, R. T., Pandanwangi, A., Meythi, M., & Setin, S. (2023). Pemberdayaan Perempuan Pelaku UMKM untuk Kemandirian Ekonomi dalam Program Kampung Bangkit di Desa Ciporeat. *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal.*, 09(1), 1–6.
- Nurjanah, R., & Syamsuri. (2020). Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Home Industri Bersinar Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Keluarga. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 44–49.

## REFERENSI

Ali, A. M., Ilmi, I., Ulpah, N. Y., Sidik, W. P., Aisyah, S., & Tazkiatunnafsi, H. (2023). Pemberdayaan Perempuan di Desa Pangkalan Melalui Pembentukan Koperasi Perempuan dan Pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

- Peraturan Presiden, R. I. (2010). Peraturan Presiden No 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Septa, Rinawati, H., & Sri, S. F. (2019). Pengembangan Model Kemitraan UMKM dengan Usaha Skala Sedang dan Besar di Jawa Timur Melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR). *Matra Pembaruan*, 3(2), 67–77.
- Sitepu, S. B., & Utami, C. W. (2018). Pemberdayaan Perempuan Dalam Pengelolaan Usaha Mikro Melalui Program Entrepreneurship Sebagai Penggerak Ekonomi Desa. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Sriyanti. (2023). Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 1(2), 1–15.
- Wibawa, Aisyah, A., Adam, A. R., & Muhammad, K. H. (2022). Jalur Nugraha Ekakurir Counter Agen Park Royal Sidoarjo. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(2), 152–168.
- Yusuf, M., & Agustang, A. (2020). Dinamika Perubahan Sosial Ekonomi Pada Masyarakat Kindang Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian, dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan*, 7(2), 31–56.